

EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH PADA BPKAD KABUPATEN BIAK NUMFOR PROVINSI PAPUA

RAINE SONI PRATAMA DOMENG

NPP.30.1441

Asdaf Kabupaten Supiori Provinsi Papua

Program Studi Keuangan Publik

Email : rainesonidomeng@gmail.com

Pembimbing Skripsi : Eko Budi Lestari, S.E, M.M

ABSTRACT

Problems/Background (GAP): *The Regional Government Information System is a web-based application which is a system designed to document, administer, and process regional development data. Purpose:* This study aims to find out how the effectiveness of Sistem Informasi Pemerintahan Daerah implementation is to improve the quality of regional financial reporting, the inhibiting factors in the implementation of Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, as well as the handling efforts carried out. **Method:** This research uses descriptive qualitative research with an inductive approach. Data collection techniques through interviews, observation and documentation. Data analysis techniques include data reduction, data presentation and conclusions.

Results/Findings: The results showed that the implementation of the Local Government Information System in BPKAD Biak Numfor Regency was quite effective, this was seen from the results of obtaining BPK opinions in Biak Numfor Regency which were getting better since the Sistem Informasi Pemerintahan Daerah was implemented, but there are still several obstacles that become inhibiting factors in its implementation, some of the obstacles in question include problems related to networks and inadequate human resources. **Conclusion:** The implementation of Sistem Informasi Pemerintahan Daerah in budgeting in Biak Numfor Regency has gone quite well and has had a good impact on regional financial management. There are several obstacles encountered in the implementation of Sistem Informasi Pemerintahan Daerah in regional financial reporting, several efforts have been made by the Regional Government of Biak Numfor Regency in dealing with existing obstacles so that it is hoped that the budgeting process using Sistem Informasi Pemerintahan Daerah can run smoothly so that maximum results are obtained.

Keywords: Effectiveness, SIPD, Regional Financial Reporting

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP) : Sistem Informasi Pemerintahan Daerah adalah sebuah aplikasi berbasis web yang sebuah sistem yang dirancang untuk mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan daerah. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah terhadap peningkatan kualitas pelaporan keuangan daerah, faktor penghambatan dalam penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, serta upaya penanganan yang dilakukan. **Metode :** Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknis analisis data meliputi reduksi data, penyajian data dan kesimpulan.

Hasil/Temuan : Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah pada BPKAD Kabupaten Biak Numfor cukup efektif, hal ini ditinjau dari hasil perolehan opini BPK pada Kabupaten Biak Numfor yang semakin baik sejak Sistem Informasi Pemerintahan Daerah diterapkan, namun masih terdapat beberapa kendala yang menjadi faktor penghambat dalam penerapannya, beberapa hambatan yang dimaksud antara lain permasalahan terkait jaringan dan sumber daya manusia yang belum memadai. **Kesimpulan :** penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah pada penganggaran di Kabupaten Biak Numfor telah berjalan cukup baik dan memberikan dampak yang baik pada pengelolaan keuangan daerah. terdapat beberapa hambatan yang ditemui dalam penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah pada pelaporan keuangan daerah, beberapa upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor dalam menangani hambatan yang ada sehingga diharapkan proses penganggaran dengan menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah bisa berjalan lancar sehingga diperoleh hasil yang maksimal.

Kata Kunci : Efektivitas, SIPD, Pelaporan Keuangan Daerah

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Untuk menciptakan kemudahan dalam menjalankan tata kelola pemerintahan, Presiden Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Berbasis Elektronik. Dalam membantu mewujudkan hal ini pemerintah menerbitkan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 sebagai pengganti dari Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah), penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah pada BPKAD Biak Numfor memberikan dampak yang cukup baik dibuktikan dengan perubahan opini BPK pada laporan keuangan.

Namun pada kondisi di lapangan, terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam penerapannya mulai dari masalah dengan jaringan, kualitas SDM yang belum memadai dalam mengoperasikan Sistem Informasi Pemerintahan DaeRAH, bahkan juga kendala yang muncul dari aplikasi itu sendiri. Sehingga hal ini menjadi perhatian khusus oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor dalam melakukan penanganan terhadap hambatan yang ditemukan agar penerapan sistem ini dapat berjalan dengan baik sehingga nantinya dapat memberikan hasil yang maksimal terkhusus dalam pengelolaan keuangan daerah.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Ada beberapa permasalahan yang berkaitan dengan penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di BPKAD Kabupaten Biak Numfor. Yang pertama berkaitan dengan kualitas jaringan di Kabupaten Biak Numfor, keterbatasan jumlah SDM yang ahli dalam mengoperasikan sistem informasi tersebut, serta permasalahan eror yang berasal dari dalam sistem itu sendiri.

1.3 Penelitian Terdahulu

Pertama penelitian yang dilakukan oleh Halens Ryanlie Ole (2014) melakukan penelitian tentang “Analisis Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Terhadap Kualitas Laporan SKPD (Studi Kasus Pada Dinas PPKAD Kabupaten Minahasa Tenggara)”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. penelitian ini yang di buat untuk menganalisis terkait bagaimana implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah terhadap kualitas laporan keuangan pada Dinas PPKAD Kabupaten minahasa Tenggara. Persamaan dengan penelitian ini yaitu Pada penelitian ini objek yang diteliti merupakan sebuah sistem informasi berbasis elektronik yang diterapkan pada pemerintah daerah.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Maulana Yusup (2016), yang mengambil penelitian dengan judul “Pengaruh Sistem Informasi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan”. Penelitian ini menggunakan Metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini hanya membahas secara umum tentang pengaruh sistem informasi keuangan terhadap kualitas pelaporan keuangan dengan menggunakan perhitungan kuantitatif.

Persamaan dengan penelitian ini yaitu terdapat pada tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pengaruh sistem informasi terhadap kualitas laporan keuangan.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Ridha Eka Putri dan Syahmardi Yacob (2021) melakukan penelitian tentang “Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Di Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jambi”. Persamaan dengan penelitian ini adalah objek yang diteliti yaitu efektivitas laporan keuangan dengan menggunakan sistem informasi dan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sedangkan perbedaannya terdapat pada penelitian ini adalah fokus dari penelitian yang melibatkan Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral dan juga perbedaan dari sistem informasi yang diteliti yaitu Sistem Informasi manajemen Daerah dan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Pada penelitian ini penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana fokus pada penelitian yang dilakukan kali ini yaitu menganalisa penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di BPKAD Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua, menggunakan teori efektivitas menurut Kenneth C. Laudon dan Jane P. Laudon 2007 dimana terdapat 4 dimensi dalam mengukur tingkat efektivitas suatu sistem aplikasi yaitu dimensi organisasi, manajemen, teknologi.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan dan mendeskripsikan bagaimana penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah pada BPKAD Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua, serta untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam penerapannya, dan upaya BPKAD dalam mengatasi faktor penghambat pada penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah oleh BPKAD Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif untuk mendapatkan informasi tentang penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah pada BPKAD kabupaten Biak Numfor. Penulis juga menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi dan triangulasi gabungan. Penulis melakukan wawancara terhadap beberapa narasumber dengan mengemukakan teori Kenneth C. Laudon dan Jane P. Laudon 2007 dengan indikator yang digunakan untuk menguraikan dan mendeskripsikan penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah pada BPKAD Kabupaten Biak Numfor.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Pada BPKAD Di Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua.

Penulis menganalisis dan mengumpulkan data berdasarkan teknik wawancara menggunakan perspektif teoritis dengan menggunakan teori efektivitas Kenneth C. Laudon dan Jane P. Laudon 2007, di dalamnya terdapat 4 (empat) dimensi yang digunakan dalam meninjau efektivitas suatu sistem aplikasi, yaitu :

a. Dimensi Organisasi

Organisasi merupakan kumpulan yang terdiri dari dua orang atau lebih dan saling bekerja sama serta memiliki ikatan guna mencapai suatu tujuan secara bersama-sama. Organisasi pada dasarnya digunakan sebagai wadah ataupun tempat dimana semua orang berkumpul bersama dan bekerja sama secara terstruktur serta sistematis dan rasional, terkendali, terencana, serta dipimpin di dalam pemanfaatan sumber daya (metode, lingkungan, material, mesin), sarana prasarana, data, dan lain-lain dengan efektif dan efisien guna mencapai tujuan dari suatu organisasi.

b. Dimensi Manajemen

Untuk mencapai tujuan di dalam suatu organisasi, maka manajemen yang baik akan sangat diperlukan di dalam organisasi tersebut. Ketika hendak melakukan pengelolaan keuangan daerah khususnya di bidang pelaporan keuangan. Pada dasarnya manajemen adalah serangkaian proses yang terdiri dari beberapa tindakan seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan serta pengendalian yang dilakukan dengan tujuan menentukan dan mencapai sasaran yang sudah ditentukan dengan memanfaatkan sumber daya yang sesuai target visi misi daerah.

c. Dimensi Teknologi

Perkembangan zaman sekarang ini semakin kompleks, selain itu kebiasaan yang ada saat ini adalah manusia lebih sering mengandalkan teknologi dalam banyak hal. Teknologi juga dimanfaatkan dalam penyelenggaraan

pemerintahan daerah. penelitian ini berfokus pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan daerah dengan menggunakan bantuan SIPD. Sistem ini merupakan inovasi yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri sebagai sarana untuk membantu penyelenggaraan pemerintahan, dalam pengembangan teknologi terdapat beberapa komponen seperti hardware (perangkat keras), software (perangkat lunak), dan jaringan, serta basis data dan pengolahan informasi.

d. Dimensi Keahlian

Dalam menjalankan sistem informasi seperti ini, sumber daya manusia memiliki peran yang cukup penting dalam seluruh proses pelaporan keuangan daerah melalui SIPD, dikarenakan manusia selaku yang bertindak sebagai user bertugas menjalankan seluruh sistem operasi. Peran sumber daya manusia sangat dibutuhkan mulai dari proses penatausahaan, penginputan data, hingga pada saat pelaporan keuangan daerah melalui SIPD.

1.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah pada BPKAD di Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua.

Adapun beberapa Faktor pendukung Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di BPKAD Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua yaitu :

- 1) Ketersediaan perangkat lunak (*software*) dan perangkat keras (*hardware*)
- 2) Ketersediaan sumber daya manusia yang mempunyai keahlian dalam mengoperasikan SIPD.

Adapun beberapa Faktor Penghambat dalam Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah pada BPKAD Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua yaitu :

- 1) Proses penatausahaan pada SIPD di Kabupaten Biak Numfor baru mencapai tahap penganggaran sehingga menyebabkan BPKAD harus menggandeng SIMDA dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah menggunakan aplikasi.
- 2) Jumlah sumber daya manusia yang ahli dalam bidang teknologi yang mampu mengoperasikan SIPD pada BPKAD Biak Numfor masih terbatas.
- 3) Koordinasi antara OPD di lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten Biak Numfor dengan BPKAD yang belum maksimal

- 4) Jaringan internet yang kadang bermasalah hingga tidak terkoneksi membuat proses penginputan data ke dalam aplikasi menjadi terhambat
- 5) Kesulitan untuk melakukan koordinasi dengan Kementerian dalam Negeri selaku operator yang menjalankan SIPD.

1.3 Upaya BPKAD dalam mengatasi faktor penghambat Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah pada BPKAD Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua.

Adapun upaya yang dilakukan yaitu :

- a. Bekerja sama dengan Kementerian dalam Negeri selaku operator yang menjalankan SIPD untuk melakukan pelatihan dan bimbingan teknis terkait dengan pengoperasian SIPD
- b. Melakukan kembali pembimbingan internal dengan lingkup yang lebih kecil antar OPD di Kabupaten Biak Numfor kepada para pegawai agar memperoleh keterampilan yang sama.
- c. Bekerja sama dengan pihak Telkom untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kapasitas terhadap jaringan untuk area Kabupaten Biak Numfor.
- d. Melakukan perawatan dan pemeliharaan terhadap fasilitas perangkat keras (*hardware*) yang dimiliki seperti laptop, pc, dan mesin print .

1.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menemukan bahwa terdapat suatu kebijakan sebagai bahan evaluasi pada pembuatan kebijakan selanjutnya, agar nantinya dapat menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang terjadi sehingga diharapkan ke depannya sistem ini dapat berjalan dengan baik dan agar penggunaanya lebih maksimal.

1.5 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis juga menemukan temuan menarik yang menjadi perhatian penulis yakni faktor penghambat dalam penerapan SIPD pada BPKAD kabupaten Biak Numfor yaitu keterbatasan sumber daya manusia yang mempunyai keahlian dalam bidang teknologi untuk menjalankan SIPD dan kualitas jaringan internet yang terkadang menjadi kendala dalam menjalankan sistem aplikasi tersebut.

IV. KESIMPULAN

Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah pada BPKAD Kabupaten Biak Numfor masih belum optimal karena ketersediaan sumber daya manusia yang terbatas, hambatan jaringan internet dan penatausahaannya yang baru sampai tahap penganggaran, sehingga membuat pemerintah menggandeng sistem yang terdahulu dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah berbasis elektronik yaitu SIMDA. Adapun faktor Pendukung dan Penghambat dalam penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah pada BPKAD Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua yaitu Landasan Hukum, sebagai acuan paling kuat pada pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah berbasis elektronik. Beberapa upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor dalam menangani hambatan yang ada seperti melakukan pelatihan dan bimbingan secara langsung di Kementerian Dalam Negeri, bekerja sama dengan pihak Telkom untuk melakukan perbaikan dan peningkatan terhadap kapasitas jaringan internet agar sistem dapat dijalankan dengan baik serta efektif dari segi waktu, dan juga terus berupaya melakukan komunikasi untuk berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri selaku pihak penyelenggara sistem terkait dengan permasalahan atau eror yang di temukan pada sistem sehingga proses penganggaran dengan menggunakan SIPD bisa berjalan lancar sehingga diperoleh hasil yang maksimal. Yang bertanggungjawab terhadap anggaran pada OPD masing-masing seharusnya bisa lebih aktif dalam melakukan pengawasan, me-review, dan melakukan validasi data. Hal ini agar setiap data yang tiap data yang disusun dan disajikan mempunyai tingkat akuntabilitas tinggi. Dan evaluasi juga harus rutin dilakukan setiap bulan terhadap penyelenggaraan SIPD, jika ditemukan hambatan serta permasalahan ataupun terjadi permasalahan yang baru dalam evaluasi maka harus dilakukan langkah cepat dalam menangani permasalahan tersebut dengan melakukan koordinasi kepada pemerintah pusat. Hal ini perlu dilakukan untuk mengurangi penumpukan dari beberapa hambatan yang seharusnya bisa segera diselesaikan.

Keterbatasan Penelitian :

Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu waktu penelitian, dimana peneliti hanya diberikan waktu 21 hari untuk mengidentifikasi permasalahan dilapangan serta membuat solusi akan permasalahan yang terjadi. Tidak hanya karena itu waktu penelitian yang singkat menyebabkan keterbatasan bagi peneliti untuk menjangkau ruang lingkup yang lebih luas dalam mengidentifikasi

permasalahan terkait dengan penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah pada BPKAD Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua.

Arus Masa Depan Penelitian (*future work*)

Peneliti menyadari masih awalnya temuan penelitian ini, oleh sebab itu peneliti menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa yang berkaitan penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah pada pengelolaan keuangan daerah. Hal ini diperuntukan agar permasalahan yang ditemukan dapat menjadi bahan evaluasi serta tolak ukur untuk mengambil kebijakan guna melakukan penanganan terhadap permasalahan dalam Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah lingkup kabupaten Biak Numfor khususnya bagi BPKAD dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah berbasis elektronik.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Biak Numfor beserta jajarannya yang telah memberi kesempatan kepada penulis dalam melakukan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mendukung pelaksanaan penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, C. D., & Yuniarto, F. E. (2019). Mekanisme Corporate Governance Dalam Perusahaan Yang Mengalami Permasalahan Keuangan. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik*, 3(2), 83–100.
- Dyahningtyas, R., Suharsih, S., & Astuti, S. R. B. (2019). Kinerja Keuangan Daerah Dan Deteksi Ilusi Fiskal Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Ekonomi-Qu*, 9(1), 119–130.
- Fatimah, N. N., Nopiyanti, A., & Mintoyuwono, D. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah. *Equity*, 21(1), 1–16.
- Kasimov, N. S. (1985). Analytical solution of the approximate equation for the pair correlation function of systems with a generalized morse potential. Three-dimensional case. *Soviet Physics Journal*, 28(10), 769–773.
- Mongisidi, E. C., Koleangan, R. A. M., & Rotinsulu, D. C. (2019). Analisis Implementasi Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Manado. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 19(9), 15–30.
- Ole, H. R. (2014). Analisis Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (Simda) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Skpd (Studi Kasus Pada Dinas Ppkad Kabupaten Minahasa Tenggara). *Accountability*, 3(2), 1.

- Sasana, H. (2009). Analisis Dampak Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kesenjangan Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. *AKSES: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 4(7), 1–21.
- Laundon, K., & JP, L. (2007). *Management Information Systems : Managing The Digital* (10th ed.). Pearson Prentice-Hall.
- Shiyan, L. N., Machekhina, K. I., Tropina, E. A., Gryaznova, E. N., & An, V. V. (2013). Effect of humic substances and silicon ions on stability of iron hydroxide (III) nanoparticles. *Advanced Materials Research*, 872, 237–240.
- Taufiqurokhman. (2008). *Konsep dan Kajian Ilmu Perencanaan*. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama, 1–106.

